Kebijakan Baru! Silakan Rame-Rame Korupsi Kalau Ketahuan Tinggal Dikembalikan, Aman Deh!

Category: Nasional,News
written by Redaksi | 29/12/2024

ORINEWS.id – Pengamat Politik Rocky Gerung mengkritik wacana Presiden Prabowo Subianto mengenai pemberian amnesti kepada koruptor yang bersedia mengembalikan hasil korupsinya.

Dalam pernyataannya, Rocky menyindir kebijakan tersebut sebagai ajakan terang-terangan untuk melegalkan korupsi.

“Kebijakan baru ini seperti mengundang orang untuk rame-rame korupsi. Kalau ketahuan, tinggal dikembalikan. Aman deh!” ujar Rocky dengan nada sarkastis saat diwawancarai, Sabtu (28/12/2024).

Menurut Rocky, pendekatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga berpotensi merusak upaya pemberantasan korupsi yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun.

Rocky menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan “meminta maaf dan

mengembalikan uang.”

Ia mengkritik pemerintah karena dianggap gagal memahami dampak destruktif dari korupsi terhadap masyarakat dan negara.

“Ini bukan sekadar soal kehilangan uang negara. Korupsi merusak peradaban, menghancurkan kepercayaan publik, dan menghilangkan hak rakyat atas kekayaan negara. Jangan pernah anggap enteng kejahatan ini,” tegas Rocky.

Ia juga mengingatkan bahwa amnesti bagi koruptor dapat menciptakan preseden buruk dan mendorong orang untuk melakukan tindakan serupa.

“Kalau begini caranya, korupsi malah jadi bisnis. Risiko rendah, untung besar,” tambahnya.

Sikap Rocky sejalan dengan kritik Mahfud MD, yang sebelumnya menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang memerlukan hukuman berat, bukan pengampunan.

Sebaliknya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mendukung ide amnesti ini, menyebut prosesnya tidak perlu melibatkan presiden.

Namun, Rocky mempertanyakan logika di balik dukungan tersebut.

“Apakah ini kebijakan untuk mempermudah korupsi? Kalau iya, kita harus siap menghadapi keruntuhan moral bangsa,” ucapnya.

Rocky mengakhiri pernyataannya dengan menekankan pentingnya menjaga prinsip hukum yang tegas dalam menghadapi korupsi.

“Kita dihadapkan pada dilema moral, membiarkan kejahatan ini terus berlangsung atau memperjuangkan keadilan dengan tegas. Pilihan kita hari ini menentukan masa depan bangsa,” pungkasnya.